

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

**Putu Citta Nirmala<sup>1</sup>**  
**Cokorda Gde Bayu Putra<sup>2</sup>**

<sup>(1)(2)</sup>Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia  
 e-mail: pcnirmala52@gmail.com

### ABSTRACT

*This research was conducted at Gianyar Regency Government. The phenomenon that occurs is the ineffective use of Original Local (PAD) and Profit Sharing Funds (DBH) and Local Expenditure (BD) that are greater than Regional Revenues. The purpose of this study is to determine the effect of PAD and DBH against Local Expenditure in Gianyar Regency Government.. The method use in this research is the method and deskriptif verifikatif with quantitative approach. The research was conducted in 15 periods in the 2006 - 2020 fiscal year. Data analysis testing techniques in this study were assisted by IBM Statistics 23, carried out through the following stages: (1)classical assumption test, (2)multiple linear regression analysis, (3)coefficient of determination (4)and hypothesis testing with t test and f test. The result of this study found that Original Local Revenue (PAD) of the Gianyar Regency Government has a positive and statistically significant influence on the Regional Expenditure (BD) of the Gianyar Regency Government, while Profit Sharng Fund (DBH) of the Gianyar Regency Government has a positive but not statistically significant effect on the Local Expenditure (BD) of the Gianyar Regency Government.*

*Keywords: Original Local Revenue, Profit Sharng Fund, Local Expenditure*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Fenomena yang terjadi adalah adanya ketidakefektifan penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil, (DBH) serta adanya Belanja Daerah (BD) yang lebih besar dari Pendapatan Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD dan DBH terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan dalam 15 periode yaitu pada tahun anggaran 2006 – 2020. Teknik pengujian analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut : (1) uji asumsi klasik, (2) analisis regresi linier berganda, (3) koefisien determinasi (4) serta pengujian hipotesis dengan uji t dan uji f. Penelitian pada Pemerintah Kabupaten Gianyar ini menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki pengaruh positif dan signifikan (secara statistik signifikan ) terhadap Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten Gianyar. (2) Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan (secara statistik signifikan) terhadap Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah

## PENDAHULUAN

Otonomi Daerah pada hakekatnya merupakan kewenangan suatu daerah otonom dalam hal mengelola urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menggunakan sumber – sumber perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi suatu daerah dapat menyebabkan pemerintah daerah dituntut agar mampu dalam hal mengelola daerahnya masing – masing termasuk dalam keuangan daerah. Dalam mengelola daerahnya, kemampuan keuangan merupakan salah satu indeks penentu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di suatu daerah. Untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, kemampuan dalam hal keuangan merupakan salah satu unsur penting.

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Bali yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan otonomi daerah. Kabupaten Gianyar dikenal sebagai gudangnya seni dan juga memiliki objek wisata yang menarik. Untuk mengatur dan mengurusnya pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan menutup kesenjangan fiskal daerah. Hal yang dapat dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut yaitu mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Semakin tingginya penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah, diharapkan daerah tersebut semakin mandiri dalam mengelola daerahnya. Berdasarkan Tabel 1.1, Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Gianyar di tahun 2020 penggunaannya kurang efektif.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Gianyar**  
**Tahun Anggaran 2006 – 2020**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2006	Rp 60.989.880.000	Rp 67.838.567.000	111,229
2007	Rp 70.620.932.996	Rp 75.124.670.729	106,377
2008	Rp 81.016.602.187	Rp 96.922.244.080	119,633
2009	Rp 86.534.000.000	Rp 112.380.710.570	129,869
2010	Rp 127.824.773.698	Rp 153.559.078.290	120,132
2011	Rp 159.348.894.322	Rp 209.598.193.887	131,534
2012	Rp 210.192.961.705	Rp 261.222.177.509	124,277
2013	Rp 238.559.202.428	Rp 319.612.004.636	133,976

2014	Rp 312.160.660.063	Rp 424.782.236.420	136,078
2015	Rp 370.679.133.600	Rp 457.321.018.460	123,374
2016	Rp 448.142.328.653	Rp 529.865.053.062	118,236
2017	Rp 610.218.627.522	Rp 697.996.674.610	114,385
2018	Rp 695.786.110.666	Rp 770.204.849.841	110,696
2019	Rp 989.105.503.660	Rp 997.478.368.035	100,847
2020	Rp 1.230.253.247.825	Rp 545.869.873.000	44,3705

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan suatu daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2001, Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah diharuskan menggunakan dana tersebut secara efisien dan efektif dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan Tabel 1.2 dari ketiga komponen Dana Perimbangan tersebut Dana Bagi Hasil pada Kabupaten Gianyar di tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019 penggunaannya kurang efektif.

**Tabel 1. 2**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil**  
**Pemerintah Kabupaten Gianyar**  
**Tahun Anggaran 2006 – 2020**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2006	Rp 35.300.090.000	Rp 21.329.518.000	60,4234
2007	Rp 17.350.325.755	Rp 23.989.994.388	138,268
2008	Rp 23.640.440.000	Rp 26.026.884.730	110,095
2009	Rp 23.539.000.000	Rp 28.590.470.230	121,46
2010	Rp 21.639.171.576	Rp 37.010.177.903	171,033
2011	Rp 23.188.500.697	Rp 29.292.356.551	126,323
2012	Rp 23.254.259.550	Rp 35.584.489.883	153,024
2013	Rp 29.420.424.052	Rp 36.365.387.599	123,606
2014	Rp 12.623.291.320	Rp 22.905.730.090	181,456
2015	Rp 24.729.422.000	Rp 18.983.900.733	76,7665
2016	Rp 26.587.184.000	Rp 27.323.004.560	102,768
2017	Rp 30.820.114.000	Rp 26.054.639.575	84,5378

2018	Rp 31.070.230.000	Rp 27.454.453.029	88,3626
2019	Rp 28.146.253.000	Rp 20.835.073.153	74,0243
2020	Rp 23.471.009.000	Rp 32.402.563.670	138,054

Aspirasi masyarakat diharapkan mampu terpenuhi oleh pemerintah, selain itu pemerintah juga diharapkan dapat lebih menggali sumber – sumber atau potensi dalam daerahnya agar mampu membiayai pengeluaran untuk pelaksanaan Belanja Daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa Belanja Daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui yang turut mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang. Kemampuan dalam hal keuangan menjadi hal yang penting dalam membiayai belanja daerah. Sugianto (2010) menyatakan bahwa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diupayakan agar belanja tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Tabel 1.3 ditunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2018, Belanja Daerah Kabupaten Gianyar melampaui Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar.

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Gianyar**  
**Tahun Anggaran 2006 – 2020**

Tahun	Pendapatan	Belanja	%
2006	Rp 406.511.152.000	Rp 111.537.287.000	27,4377
2007	Rp 549.618.902.921	Rp 525.546.762.296	95,6202
2008	Rp 652.094.868.840	Rp 629.285.275.510	96,5021
2009	Rp 758.755.615.020	Rp 713.896.671.840	94,0878
2010	Rp 771.521.566.111	Rp 754.075.486.599	97,7387
2011	Rp 889.407.725.260	Rp 856.801.660.612	96,334
2012	Rp 1.066.239.510.839	Rp 1.006.500.071.867	94,3972
2013	Rp 1.248.415.647.570	Rp 1.192.027.628.857	95,4832
2014	Rp 1.464.193.988.495	Rp 1.417.094.054.684	96,7832
2015	Rp 1.527.797.536.119	Rp 1.504.436.669.135	98,4709
2016	Rp 1.682.779.028.622	Rp 1.786.411.820.669	106,158
2017	Rp 1.808.814.501.382	Rp 1.922.948.829.852	106,31
2018	Rp 2.002.646.874.600	Rp 2.046.852.685.064	102,207
2019	Rp 2.308.871.426.066	Rp 2.229.485.809.062	96,5617

2020	Rp 1.884.291.843.347	Rp 2.074.387.626.996	110,088
------	----------------------	----------------------	---------

Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan fenomena tersebut yang meliputi *Original Local Revenue* (PAD) dan *Profit Sharing Fund* (DBH) terhadap *Local Expenditure* (BD) diantaranya yang dikemukakan oleh Dian Setiawan (2012) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah ( studi pada Pemerintah Kota Bandung) menyebutkan Belanja Daerah yang defisit pada tahun 2008 disebabkan karena realisasi pendapatan asli daerah yang tidak efektif pada tahun 2008. Dan Belanja Daerah yang defisit pada tahun 2010 disebabkan karena realisasi Dana Bagi Hasil yang tidak efektif pada tahun 2010.

Berdasarkan studi empiris dan fenomena yang terjadi maka, penulis tertarik melakukan telaah ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar”**

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten Gianyar?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten Gianyar?

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar baik secara parsial maupun simultan.

## KAJIAN PUSTAKA

Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan suatu daerah yang dipungut sesuai peraturan. *Original Local Revenue* ini bersumber dari :

- Pajak Daerah (*Local Tax*),
- Retribusi Daerah (*Restribution Local*),
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (*the results of the management of separated regional assets*),
- dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (*and others - Other revenue (PAD) legitimate*).

Dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil (*Profit Sharing Fund*) yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
- dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan Dana Bagi Hasil (*Profit Sharing Funds*) yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari penerimaan kehutanan, penerimaan pertambangan umum, penerimaan perikanan, penerimaan pertambangan minyak bumi, penerimaan pertambangan gas bumi, dan penerimaan pertambangan panas bumi.

Berdasarkan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud Belanja Daerah (BD) merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Y Sri Pudyatmoko menyatakan bahwa :

“ Sebagaimana umumnya, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), uang hasil retribusi masuk ke bagian pendapatan. Pendapatan dari retribusi perizinan ini bersama – sama dengan pendapatan dari sumber lain digunakan untuk menopang kebutuhan belanja daerah” (2009:67).

Sesuai dengan uraian tersebut bisa diartikan bahwa pendapatan digunakan untuk mencapai target belanja yang belum dicapai baik untuk entitas bisnis maupun pemerintah.

Menurut Carol J.pierce dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi Kehutanan menyatakan bahwa :

“Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertical antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil & dana alokasi umum) menyamakan kemampuan fiskal pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk kegiatan – kegiatan prioritas pembangunan nasional, mendorong pencapaian pelayanan & standar minimum, & merangsang mobilitas pendapatan” (2005:176)

Sesuai dengan uraian tersebut bisa diartikan bahwa bahwa penerimaan Dana Bagi Hasil suatu daerah turut mendanai belanja daerah yang merupakan pengeluaran daerah.

Hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan pedoman yaitu, Penelitian terdahulu Resi Intan Permata Sari (2015) pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah 2012 -2014 menyebutkan PAD berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Belanja Daerah.

Elisabeht (2018) yang dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa *Original Local Revenue (PAD) have positive dan significant effect to Local Expenditure (BD) while Profit Sharing Fund (DBH) have positif but no significant effect to Local Expenditure (BD)*.

Penelitian terdahulu, Yolanda Wulandari (2014) mengemukakan bahwa Dana Bagi hasil (DBH) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Dijelaskan dalam penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali oleh Ida Bagus Dwi Putra dan A.A.N.B Dwirandra (2018) dipaparkan bahwa *profit sharing funds (DBH) and original local revenue (PAD) have positive and significantly effect on Local Expenditure (BD)*.

Dian Setiawan (2012) menyatakan bahwa PAD secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung . Sementara itu DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung. Selain itu secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan pada kerangka teoritis dan kajian penelitian terdahulu. adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh masing – masing daerah dengan mengumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang penting dari suatu daerah otonom untuk pemerintah yang turut memenuhi pengeluaran meliputi belanja daerah serta menilai kemampuan daerah pada saat melakukan aktivitas daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka dapat dikatakan semakin mandiri kemampuan suatu daerah tersebut, dengan demikian dapat berarti tidak harus bergantung pada penerimaan dana transfer. Hal ini diperkuat oleh penelitian pada Pemerintah Kota Bandung yang dilakukan oleh Dian Setiawan (2012) yang menyatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara *Original Local Revenue* (Pendapatan Asli Daerah) terhadap *Local Expenditure* (Belanja Daerah). Dengan demikian maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Gianyar**

Dana Bagi Hasil merupakan penerimaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada suatu daerah otonom yang turut mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dana Bagi Hasil yang diperoleh diharapkan mampu untuk

meningkatkan alokasi Belanja Daerah guna meningkatkan pelayanan public bagi daerah. Hal ini diperkuat dengan penelitian pada Kabupaten dan Kota di Indonesia yang dilakukan oleh Yolanda Wulandari (2014) mengemukakan bahwa Dana Bagi hasil (DBH) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) . Dengan demikian maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh antara dana bagi hasil terhadap belanja daerah Kabupaten Gianyar.**

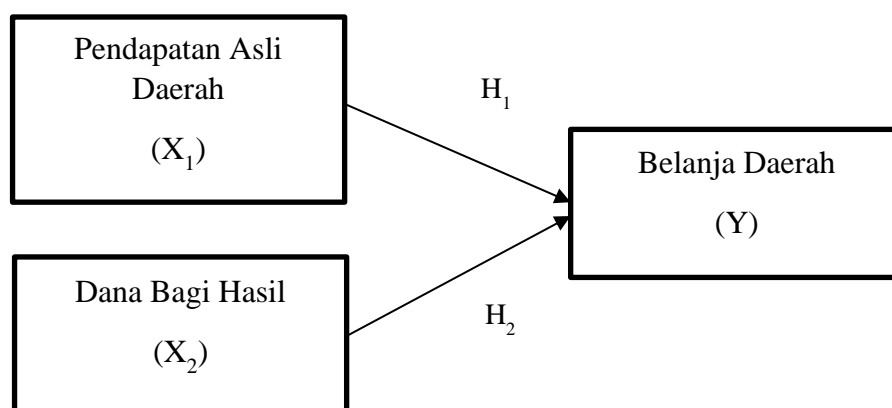
## METODE PENELITIAN

Pendapatan asli daerah (PAD) pada dasarnya merupakan salah satu komponen penerimaan daerah. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka diharapkan suatu Daerah semakin mandiri mengelola daerahnya. Selain Pendapatan Asli Daerah, untuk mengurangi celah fiscal antara suatu daerah dengan daerah lainnya Pemerintah Daerah juga memperoleh dana transfer dalam bentuk Dana Perimbangan yang termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten Gianyar. Sehingga Kerangka Berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.1**

### Kerangka Berpikir

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar





Penelitian ini menggunakan *descriptive analysis and verification methods* dengan pendekatan kuantitatif. *Descriptive analysis and verification methods* dengan pendekatan kuantitatif merupakan *Method* yang memiliki tujuan mendeskripsikan bagaimana suatu fakta tentang variable melalui pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dalam pengujian hipotesis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumentasi, informasi, dan data-data yang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Data *times series* (runtun waktu) selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut meliputi data yang berkaitan dengan penelitian ini pada Laporan Realisasi APBD, yang bersumber dari data online yang ada di situs web [www.gianyarkab.bps.go.id](http://www.gianyarkab.bps.go.id) dan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

Lokasi penelitian ini yaitu bertempat di Kabupaten Gianyar. Pengambilan data dilakukan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar melalui situs website [www.gianyarkab.bps.go.id](http://www.gianyarkab.bps.go.id) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan melalui situs website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Populasi dalam penelitian ini Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Gianyar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Gianyar periode 2006-2020 yaitu sebanyak 15 periode. Besar sampel dalam penelitian ini yaitu sebesar 45 sampel.

Variabel bebas dalam penelitian ini ialah Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) dan Dana Bagi Hasil ( $X_2$ ). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah ( $Y$ ).

Dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan teknik analisis yaitu :

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menganalisa apakah model regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini Pengujian Normalitas menggunakan Uji *One Sampel Kolmogorov-Smirnov Test* dan analisis grafik normal PP Plot.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas memiliki tujuan menganalisa apakah diantara variabel bebas pada model regresi dijumpai adanya korelasi. Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Dimana jika nilai *Tolerance*  $> 0.10$  dan *VIF*  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas adalah melihat titik scatter plot dan uji koefisien korelasi Spearman. Model regresi yang baik adalah tak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi memiliki tujuan menganalisa apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya  $t-1$  dalam model regresi linear (Ghozali, 2011:110).

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya serta analisis data menggunakan uji statistik regresi linier berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

$Y$  = Belanja Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel  $X_1$

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel  $X_2$

$X_2$  = Dana Bagi Hasil

$\varepsilon$  = Variabel Pengganggu

3. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Adjusted- $R^2$  atau  $R$  untuk mengevaluasi model regresi.

4. Uji T

Uji statistik  $t$  pada umumnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Kriteria pengujiannya berdasarkan perbandingan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji  $t$  adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$ , maka PAD dan DBH tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah.

$H_a : \beta \neq 0$ , maka PAD dan DBH berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah.

Dasar pengambilan keputusan :

Jika nilai  $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak

Jika nilai  $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima

5. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (X) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Kriteria pengujiannya berdasarkan perbandingan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ .

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$ , maka PAD dan DBH tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah.

$H_a : \beta \neq 0$ , maka PAD dan DBH berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah.

Dasar pengambilan keputusan :

Jika nilai  $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak

Jika nilai  $F_{hitung} < \text{nilai } F_{tabel}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian dalam penelitian ini dibantu dengan software IBM SPSS Statistic 23 yang dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut : (1) uji asumsi klasik, (2) analisis regresi linier berganda, (3) koefisien determinasi (4) serta pengujian hipotesis dengan uji t dan uji f. Hasil pengujian pada penelitian ini akan dibahas berikut ini :

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

##### 1. Uji *One Sampel Kolmogorov-Smirnov Test*

**Tabel 4.1**

### Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0000081
	Std. Deviation	188506407551,40887000
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,114
	Negative	-,089
Test Statistic		,114
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

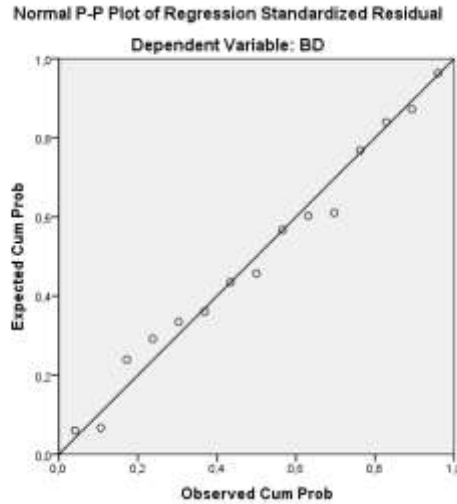
Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari uji Kolmogorov Smirnov sebesar 0,200. Nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,200 dari lebih besar taraf kesalahan 5% (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi berdistribusi normal.

2. Metode Grafik

**Gambar 4.4**

**Grafik PP Plot Hasil Pegujian Normalitas**



Pada Grafik 4.4 Terlihat bahwa titik- titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan nilai residual memenuhi asumsi normal.

b. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.2**

**Hasil Untuk Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	,941	1,062
DBH	,941	1,062

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

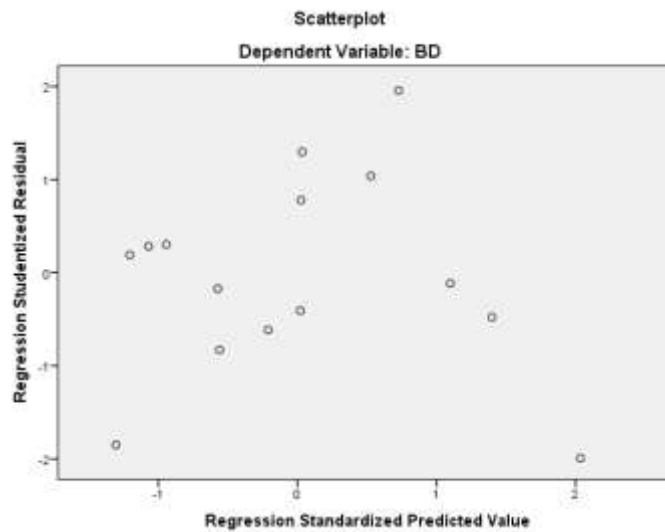
Tabel 4.2 menunjukkan nilai *tolencare* kedua variabel indenpenden  $X_1$  dan  $X_2 > 0,10$  dan begitu juga dengan nilai VIFnya  $< 10$ . Maka dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

1. Titik Scatterplot

**Gambar 4.5**

**Grafik Scatterplot**



Titik – titik menyebar pada Grafik pada Lampiran dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga pada penelitian ini tak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Koefisien Korelasi Spearman’s Rho

**Tabel 4.3**

**Hasil Korelasi Spearman’s rho**

Variabel	Sig (2-tailed)
PAD (X <sub>1</sub> )	0,603
DBH (X <sub>2</sub> )	0,676

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Dari Tabel 4.3 nilai Sig. (2-tailed) PAD sebesar 0,603 dan DBH sebesar 0,676 memiliki nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi heteriskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

**Tabel 4.4**

**Hasil untuk Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1,590

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD

b. Dependent Variable: BD

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Dengan  $n = 15$  dan  $k = 2$  maka didapatkan nilai  $DL = 0,9455$  dan  $DU = 1,5432$  sehingga  $4-DL = 3,0545$  dan  $4-DU = 2,4568$ . Dilihat dari Tabel 4.4 nilai Durbin-Watson sebesar 1,590 terletak diantara  $DU < DW < 4-DU$  ( $1,5432 < 1,590 < 2,4568$ ) sehingga dalam penelitian ini tak terjadi autokorelasi.

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.5**  
**Hasil Analisis Regresi**

Regresi Linier Berganda			
Variabel	Koefisien regresi (B)	t <sub>hitung</sub>	sig
Konstanta	-101050405003	-0,333	0,750
Pendapatan Asli Daerah	2,276	11,541	0,000
Dana Bagi Hasil	17,557	1,785	0,100
F Hitung	67,136		
R	0,958		
Adjusted R Square	0,904		

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 persamaan regresi yang didapat adalah :

$$Y = -101050405003,438 + 2,276 X_1 + 17,557 X_2$$

- Nilai konstanta pada persamaan sebesar -101050405003,438 menjelaskan nilai rata – rata Belanja Daerah (BD) pada saat kedua variabel independen konstan (tidak berubah) atau sama dengan nol adalah sebesar Rp. -101050405003,438.
- Koefisien regresi untuk PAD ( $X_1$ ) sebesar 2,276 berarti bahwa setiap penambahan peningkatan  $X_1$  (PAD) sebesar Rp.1,00 maka akan terjadi peningkatan Y (Belanja Daerah) sebesar Rp. 2,276.
- Koefisien regresi untuk DBH ( $X_2$ ) sebesar 17,557 berarti bahwa setiap penambahan peningkatan  $X_2$  (DBH) sebesar Rp.1,00 maka akan terjadi peningkatan Y (Belanja Daerah) sebesar Rp. 17,557.

### 3. Koefisien Determinasi

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa *Adjusted R Square* sebesar 0,904. Dengan kata lain sebesar 90,4% dari perubahan Belanja Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil sedangkan 9,6% dipengaruhi faktor lain.

### 4. Uji T

- Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD)

Berdasarkan Tabel 4.5 nilai  $t_{hitung}$  Pendapatan Asli Daerah diperoleh sebesar 11,541. Dari Tabel  $t_{\alpha} = 0,05\%$  dan derajat bebas  $= n - k - 1 = 15 - 2 - 1 = 12$ , diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,17881. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 11,541 > nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,17881 maka  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima. Sehingga dapat dikatakan dengan tingkat kepercayaan 95% artinya  $X_1$  (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).

- Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (BD)

Berdasarkan Tabel 4.5 nilai  $t_{hitung}$  Dana Bagi Hasil diperoleh sebesar 1,785. Dari Tabel  $t$   $\alpha = 0,05$  % dan derajat bebas  $= n - k - 1 = 15 - 2 - 1 = 12$ , diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,17881. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,785  $>$  nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,17881 maka  $H_0$  diterima sehingga  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat dikatakan dengan tingkat kepercayaan 95% artinya Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).

## 5. Uji F

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat nilai  $F_{hitung}$  sebesar 67,136. Dari Tabel  $F$   $\alpha = 0,05$  dan derajat bebas (2:12) diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,89. Nilai  $F_{hitung}$  sebesar 67,136  $>$  nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,89 maka  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dimana nilai  $t_{hitung}$  *Original Local Revenue* (PAD) sebesar 11,514 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi sebesar 2,276. Oleh karena itu dapat dikatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki pengaruh positif dan signifikan (secara statistik signifikan) terhadap Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten Gianyar. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pengeluaran atas Belanja Daerah (BD) juga akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu menyediakan dana dalam urusan otonomi daerah berdasarkan dengan potensi masing – masing daerah. Hasil penelitian ini berarti sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ida Bagus Dwi Putra dan A.A.N.B Dwirandra (2015) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki pengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan (secara statistik signifikan) terhadap Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten Gianyar dan , dimana nilai  $t_{hitung}$  *Profit Sharing Fund* (DBH) sebesar 1,785 dengan nilai signifikansi sebesar 0,100 dan koefisien regresi sebesar 17,557. Hal ini disebabkan karena *Profit Sharing Fund* (DBH) merupakan komponen dari Dana Perimbangan yang nilai nya relatif lebih kecil dibandingkan dengan komponen – komponen Dana Perimbangan lainnya. Selain itu pada tahun 2006, 2015, 2017,2018 dan 2019 penggunaan Dana Bagi Hasil kurang efektif. Hasil penelitian ini berarti sesuai dengan penelitian Elisabeth

(2018) yang menyatakan bahwa pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (DBH) adalah memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) positif dan signifikan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sehingga simpulan dalam penelitian ini adalah :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki pengaruh positif dan signifikan (secara statistik signifikan) terhadap Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten Gianyar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pengeluaran atas Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan (secara statistik signifikan) terhadap Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten Gianyar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak efektif penggunaan Dana Bagi Hasil, maka semakin tidak ekonomis Belanja Daerah namun tidak signifikan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan uraian – uraian sebelumnya ialah agar peneliti selanjutnya yang akan meneliti berhubungan dengan variabel – variabel yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini jika ingin hasil kedua variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, maka agar nantinya sampel ditambah minimal 30 sampel. Penambahan sampel bisa dengan menambah jumlah Kabupaten/Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminus, Rahmi. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir*. Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri. Universitas Palembang
- Elisabeht. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Serta Flypaper Effect Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma
- Ernayani, Rihfenti. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)*. Universitas Balikpapan
- Marlia, Rima. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Bandung)*. Universitas Komputer Indonesia.



- 
- Primayastama, Romie . 2020. *The Book Of SPSS Pengolahan & Analisis Data*. Yogyakarta. Penerbit START UP
- Putra, Ida Bagus Dwi dan A.A.N.B. Dwirandra. 2015. *Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali*. Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana
- Republik Indonesia, 2004, *Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Setiawan, Dian. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar)*. Skripsi. Bandung. Universitas Komputer Indonesia
- Sugiyono. 2015 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta
- Untung, Joko dkk. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Dan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010-2014*. Universitas Pancasila
- Wahyuni, Susanti Eka dan Indrian Supheni. 2017. *Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016*. Jurnal Akuntansi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
- Wulandari, Yolanda. 2014. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Indonesia*. Universitas Negeri Padang
- Yulia, Yuyu. 2011. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Yang Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)*. Skripsi. Bandung. Universitas Komputer Indonesia.